

Research Article

Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Menurut Munawir Syadzali

Rakhmad Zubair¹, Rustam Ibrahim²

1. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, rakhmadzubair@gmail.com
2. Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, rustamibrahim@staff.uinsaid.ac.id

Copyright © 2024 by Authors, Published by Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Received : October 17, 2024
Accepted : December 19, 2024

Revised : November 28, 2024
Available online : December 25, 2024

How to Cite: Rakhmad Zubair, and Rustam Ibrahim. 2024. "Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Menurut Munawir Syadzali". Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam 10 (4):1766-74. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v10i4.1189.

Abstract. This article discusses the discourse of renewal in improving and advancing the education system in the context of modernisation of Islamic educational institutions in Indonesia. Munawir Syadzali's thoughts have recently been in the public spotlight because of his ideas in the development of the madrasah system. Munawir Syadzali offers a special programme for madrasah institutions as an effort and alternative to prepare superior generations and solve the problem of scarcity of scholars and experts in Islamic education in Indonesia. Madrasah as an institution under the auspices of the Indonesian Ministry of Religious Affairs is encouraged to continue to appear more modern both physically and academically. The system that is built also undergoes development starting from the learning process, teaching staff, and the education curriculum with Islamic characteristics. It has been noted that the presence of special programmes at Madrasah Aliyah in particular has brought its graduates to become bachelors, masters, and even doctors in various disciplines and universities in Indonesia and abroad. Through this article, it is hoped that MAPK should be reconsidered so that their development aims to be a good madrasah model in tafaqquh fid-din as its main mission.

Keywords: Islamic Education, Munawir Syadzali, Madrasah.

Abstrak. Artikel ini membahas tentang wacana pembaharuan dalam meningkatkan dan memajukan sistem pendidikan dalam konteks modernisasi lembaga pendidikan islam di Indonesia. Pemikiran Munawir Syadzali belakangan menjadi sorotan publik oleh sebab gagasannya dalam pengembangan sistem di Madrasah. Munawir Syadzali menawarkan program khusus bagi lembaga madrasah sebagai suatu upaya dan alternatif untuk menyiapkan generasi unggul serta menyelesaikan problem kelangkaan ulama dan pakar pendidikan agama Islam di Indonesia. Madrasah sebagai lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Indonesia didorong untuk terus tampil lebih modern baik pada fisik dan akademiknya. Sistem yang dibangun juga mengalami pengembangan mulai dari

Rakhmad Zubair, Rustam Ibrahim

proses pembelajarannya, tenaga pendidik, dan kurikulum pendidikannya yang bercirikan Islam. Tercatat bahwa dengan hadirnya program khusus pada Madrasah Aliyah khususnya telah membawa para lulusannya menjadi sarjana, master, bahkan doctor di berbagai disiplin ilmu dan perguruan tinggi di Indonesia maupun di luar negeri. Melalui artikel ini diharapkan bahwa MAPK harus diperhatikan kembali agar tujuan pengembangannya menjadikan model madrasah yang baik dalam tafaqquh fid-din sebagai misi utamanya.

Kata Kunci: Pendidikan Islam, Munawir Syadzali, Madrasah.

PENDAHULUAN

Keberlangsungan pendidikan Islam di Indonesia dengan sejarah perkembangannya menjadi topik menarik untuk ditelaah, dikaji, dan dianalisis secara kritis dalam berbagai forum ilmiah. Demikian itu menjadi salah satu upaya pembangunan serta pengembangan dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia agar mutu pendidikan bangsa dapat terus ditingkatkan dan dipahami secara lebih mendasar, seimbang dan merata, komprehensif, serta tepat sasaran. Dengan segala persoalan baik kelebihan serta kekurangannya, pelaksanaan pendidikan harus terus dikawal guna mewujudkan cita bangsa sebagaimana tertuang pada pembukaan UUD 1945 dalam misi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah juga telah menetapkan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) yang lebih lanjut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 terkait Standar Nasional Pendidikan yang memuat delapan poin yaitu : standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan dan keseluruhannya sesungguhnya mengarah pada tujuan penyelenggaraan pendidikan (2006).

Dalam Kongres Pendidikan Islam Sedunia yang diselenggarakan di Islamabad pada tahun 1980 dihasilkan sebuah rumusan tujuan pendidikan Islam: *“Education should aim at the balanced growth of total personality of man through the training of man’s spirit, intellect the rational self, feeling and bodily sense. Education should there for cater for the growth of man in all its aspect, spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individually and collectively, and motivate, all these aspect toward goodness and attainment perfection. The ultimate aim of education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual. The community and humanity at large”* (Sholeh, 2016) atau yang dapat disimpulkan bahwa pendidikan secara keseluruhan harus mengarahkan pada pertumbuhan yang seimbang dari kepribadian manusia melalui latihan kejiwaan, pembentukan nalar intelektual, akal budi, serta perasaan dan kepekaan. Pendidikan harus ada untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan manusia dalam segala aspeknya dari nilai spiritual, intelektual, imajinasi, jasmani, ilmiah, bahasa atau linguistik, baik secara individu maupun secara kolektif, serta memotivasi semua aspek tersebut demi kebaikan menuju kebaikan dan mencapai kesempurnaan. Tujuan akhirnya adalah realisasi penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah baik bagi individu, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya.

Di era globalisasi yang berkembang sangat cepat dan semakin meluas ini, setiap bangsa perlu untuk meningkatkan daya persaingan di hadapan tantangan

global dalam berbagai sektor dan bidang terutama dalam sumber daya manusia yang berkualitas. Setiap orang dituntut untuk menyesuaikan perkembangan zaman yang begitu deras dengan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Namun manusia yang berkarakter kuat juga sangat diperhitungkan sebagai nilai kualitas yang tidak boleh dipisahkan.

Oleh sebab itu, pendidikan bangsa harus melakukan upaya penyesuaian, pembenahan, serta proses peningkatan dan pengembangan yang berkelanjutan dan terus-menerus sepanjang hidup (*long life education*). Sebab pendidikan merupakan sarana strategis dalam meningkatkan kualitas suatu bangsa (Bustomi, 2023). Sebagaimana dikutip oleh Ahmadi yang mengungkapkan bahwa kemajuan peradaban suatu bangsa diukur dari mutu pendidikan bangsa itu sendiri (Chairiyah, 2021). Sudah banyak negara seperti Amerika, Jerman, Jepang, Belanda, Mesir, dan beberapa negara lain yang terus menawarkan pendidikan lengkap dan juga berkualitas. Beberapa nama universitas di Barat menjadi favorit tujuan belajar banyak pelajar di seluruh dunia.

Bila dibandingkan antara negara-negara tersebut dengan realita pendidikan di Indonesia, ada beberapa kelemahan yang menjadikan standar kualitas pendidikan di Indonesia terbelakang masih tertinggal jauh di bawah mereka. Beberapa indikator kelemahan tersebut dapat dilihat setidaknya dari enam hal yaitu sarana dan prasarana atau fasilitas, bahan baku (input) peserta didik, proses pelaksanaan pendidikan, budaya riset dan penelitian, desain kurikulum dan yang terakhir adalah kualifikasi pendidik (Soenjono Dardjowidjojo, 2003). Dan ini tidak dialami oleh lembaga pendidikan di bawah naungan Depdiknas saja, tapi juga pada tingkat madrasah sebagai buah ide pembaharuan pendidikan yang dinaungi oleh Departemen Agama.

Khusus pada pendidikan di madrasah, Prof Munawir Syadzali yang merupakan tokoh intelektual dan agamis membuka pintu reformasi pendidikan di madrasah dengan membuat Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) sebagai solusi atas keterbelakangan pendidikan di Indonesia. Tokoh diplomat yang pernah menjabat sebagai pimpinan Kementerian Agama sejak masa Kabinet Pembangunan IV (1983 – 1988) hingga kabinet Kabinet Pembangunan V (1988 – 1993) ini juga menggagas MAPK ini sebagai suatu upaya serius mengatasi kelangkaan tokoh alim-ulama di Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 371 pada tahun 1993.

Melalui makalah ini, diharapkan pemikiran dan pembaharuan lembaga pendidikan di Indonesia khususnya dari perspektif Prof Munawir Syadzali ini dapat dijadikan salah satu sumber wawasan yang bisa terus diambil manfaatnya dan juga menjadi referensi bagi setiap pembaca, pelajar, lembaga bahkan kalangan masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat *library research* atau kajian pustaka. Karena dari itu dalam prosesnya sejak awal hingga akhir penelitian penulis menggunakan berbagai macam referensi pustaka yang relevan untuk membantu menjawab permasalahan yang diteliti. Sementara itu, penelitian kajian pustaka merupakan penyajian argumentasi penalaran keilmuan yang menjabarkan hasil kajian pustaka dan hasil analisa peneliti mengenai topik atau masalah dari topik kajian, dimana memuat beberapa gagasan atau proposisi yang relevan dan harus

didukung oleh data yang diperoleh dari sumber pustaka.

Obyek penelitian ini adalah gagasan pemikiran Munawir Syadzali terkait modernisasi pengembangan lembaga pendidikan Islam. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik dengan menerapkan analisa konten. Untuk membantu dan memudahkan analisa konten tersebut, langkah yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan data-data dari berbagai macam journal, artikel, serta buku-buku yang relevan dan sesuai dengan topik pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Prof Munawir Syadzali

Munawir Syadzali adalah salah satu putra terbaik bangsa Indonesia berdarah suku Jawa kelahiran Karanganyar, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Putra dari pasangan Abu Aswad Hasan Syadzali dan Tas'iyah ini lahir pada tanggal 07 November 1925. Dia juga merupakan putra sulung dari delapan bersaudara. Secara umum dilihat dari sisi kehidupan ekonomi keluarganya memang termasuk golongan yang jauh dari kata sejahtera. Tapi keluarganya justru sangat agamis lantaran termasuk kalangan yang terdidik di pondok pesantren.

Munawir Syadzali kecil memulai pendidikan dasar dan menengah di Solo sekitar tahun 1937 -1940. Kemudian ia juga terus melanjutkan studinya di Solo pada jenjang sekolah menengah atas dan Sekolah Tinggi Islam Mamba'ul Ulum pada tahun 1943. Setelah tamat sekolah diamanahi sebagai guru untuk mengajar di Ungaran, Semarang (1944 -1945). Selain itu, dia juga mengikuti beragam program studi lainnya seperti Kursur Diplomatik dan Konsuler Deplu di Universitas Exeter, Inggris Raya (1953 -1955) dan berhasil meraih gelar Master of Arts dari Universitas Georgetown di Amerika Serikat selang lima tahun berikutnya (1959). Sedangkan gelar Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Agama Islam beliau peroleh di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta (dulu disebut IAIN)

Selama masa perjuangan kemerdekaan beliau juga memiliki andil besar khususnya sebagai wasilah penghubung antara markas tempur di Jawa Tengah dengan berbagai kalangan dari badan laskar umat Islam. Dan pasca kemerdekaan, tokoh intelek dan agamis yang juga menjadi diplomat ulung ini diberikan amanah untuk menduduki kursi pimpinan di Kementerian Agama selama dua periode yaitu pada masa Kabinet Pembangunan IV dan V pada tahun 1983 sampai tahun 1993.

Sebelumnya, beliau juga sudah mulai berkarir dan terus berkembang beliau juga pernah aktif di Departemen Luar Negeri yang mulai dirintis sejak tahun 1950 ketika ditugaskan sebagai salah satu wakil Indonesia untuk seksi Timur-Tengah. Kiprahnya selama bertugas di luar negeri cukup baik sehingga ia menjalankan tugas berturut-turut di berbagai daerah seperti di Washington DC pada tahun 1956-1959 dan pernah juga di Kolombo tahun 1963-1968. Sedangkan di tahun 1971 sampai 1980-an beliau terpilih sebagai Duta Besar baik di London maupun di negara Kawasan Timur Tengah seperti Kuwait, Bahrain, dan Qatar juga Uni Emirat Arab. Beberapa tugasnya dalam negeri juga sudah cukup banyak termasuk pernah menjadi Komnas HAM untuk Republik Indonesia.

Sebagai tokoh dari kalangan intelektual, beragam ide dan pemikirannya juga beliau tulis dalam karya buku. Beberapa buku ternama yang beliau karang di

antaranya adalah ; 1) Islam dan Tata Negara, 2) Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa, 3) Ijtihad Kemanusiaan, 4) Reaktualisasi Hukum Islam, 5) Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, dan lain sebagainya (Ilyas, 2006).

Kajian Sejarah Pembaruan Pendidikan Melalui Madrasah

Terminologi madrasah adalah dari bahasa Arab dengan bentuk *isim makan* dari kata *darasa-yadrusū-darsan wadurūsan wa dirāsatan*, yang bermakna; terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang, melatih, mempelajari. Madrasah berarti tempat untuk mencerdaskan peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan, memberantas kebodohan, serta melatih keterampilan mereka, sesuai bakat, minat, dan kemampuannya. Istilah *madrasah* ini menandakan suatu pelaksanaan pembelajaran secara kolosal bersama dalam majlis ilmu baik berupa materi kajian atau pembahasan nilai ajaran agama dan juga ilmu umum (Abu Hamid, 1983).

Pendidikan madrasah terbagi menjadi tiga jenjang yakni: 1) Madrasah Ibtidaiyah atau yang disingkat dengan MI, merupakan lembaga pendidikan Islam yang memberikan pendidikan dan pengajaran rendah serta menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran umum. 2) Madrasah Tsanawiyah, yang disingkat MTs ialah lembaga pendidikan Islam yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai satu mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya bermuatan 30% di samping mata pelajaran umum. 3) Madrasah Aliyah, yang disingkat MA ialah lembaga pendidikan Islam yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah atas serta menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya hanya berkisar 30 % di samping mata pelajaran umum (Zakiah Daradjat, 2006).

Madrasah dalam SISDIKNAS atau sistem pendidikan nasional dapat dilihat pada berbagai peraturan perundang-undangan baik yang sudah tidak berlaku lagi maupun yang masih berlaku. Seperti Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri. Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, di dalamnya dikemukakan bahwa Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah Dasar. Madrasah Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama. Madrasah Aliyah setingkat dengan Sekolah Menengah Atas (Zakiah Daradjat, 2006).

Saat ini, kedudukan madrasah dalam sistem pendidikan nasional dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 (Hasbullah, 2008). Dalam bab mengenai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dijelaskan bahwa Pendidikan Dasar berbentuk SD dan MI, atau bentuk lain yang sederajat. Sekolah Menengah Pertama berbentuk SMP dan MTs, atau bentuk lain yang sederajat, dan sekolah Menengah Atas berbentuk SMA dan MA, atau bentuk lain yang sederajat (2006).

Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI. Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan pasal 14, 15, dan 16 dijelaskan bahwa:

1. Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.

2. Pendidikan diniyah dasar menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri atas 6 (enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat SMP/MTs yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.
3. Pendidikan diniyah menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3(tiga) tingkat (2007)

Sejak awal didirikannya, beragam upaya inovasi dalam peningkatan pengembangan madrasah telah dilakukan oleh pemerintah yang dalam hal ini Departemen Agama, dimaksudkan untuk meningkatkan mutu produk lulusan sekolah madrasah.

Gagasan Pemikiran Modern Munawir Syadzali dalam Pendidikan Islam di Indonesia

Saat Kementerian Agama dipimpin oleh Mukti Ali, beliau sempat menawarkan suatu konsep alternatif pengembangan bagi lembaga pendidikan madrasah yakni melalui SKB 3 Menteri, yang kemudian berusaha menyejajarkan kualitas madrasah dengan non-madrasah dengan meracik porsi kurikulum 70 % muatan umum dan 30 % muatan agama. Berangkat dari konsep ini, Prof Munawir Syadzali kemudian mengembangkan konsep Madrasah khususnya bagi tingkat Menengah Atas dengan Program Khusus sebagai sebuah tawaran untuk menyelesaikan problematika pendidikan Islam yang dinilai kurang mampu memproduksi para ilmuwan yang juga sebagai tokoh alim ulama yang *faqih fid din*.

Berbeda dengan konsep Mukti Ali, Munawir Syadzali dalam konsep MAPK ini dikatakan bahwa kurikulum dan pelaksanaan pendidikannya bermuatan sekitar 70% dari bidang-bidang studi agama (Maksum, 1999). Maksud dari konsep ini adalah agar lulusan MAPK mampu menjadi solusi penyelesaian kelangkaan ulama. Lulusan MAPK diharapkan mampu menjawab masalah tersebut, yang sekarang ditetapkan sebagai Madrasah Aliyah Kejuruan (Bidang Keagamaan).

Sebenarnya ada lembaga pendidikan berbasis pondok pesantren yang juga dinilai punya daya tekan lebih pada peningkatan dan penguatan kurikulum *diniyah* atau muatan keagamaan. Bahan hal ini sudah mulai berjalan kurang lebih sejak tahun 1987. Pondok pesantren berkomitmen untuk mengembangkan dan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman serta mencetak kader-kader ulama sekaligus toko diplomat. Hal ini yang mendasari respon pemerintahan untuk mengizinkan diselenggarakannya program dengan konsep serupa pada tingkat Madrasah Aliyah yaitu sesuai dengan apa yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 371 tahun 1993, yang kurikulumnya tertuang pada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 374 tahun 1993 kemudian dibukalah MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) atas gagasan Munawir Syadzali ini.

Beberapa madrasah dengan program khusus yang pertama didirikan dan diselenggarakan di Indonesia pada tahap pertama adalah; MAN Darussalam Ciamis Jawa Barat, MAN Yogyakarta, MAN Ujung Pandang Makassar Sulawesi Selatan, MAN Kota Baru Padang Sumatera Barat, dan MAN Jember Jawa Timur. Kehadirannya sangat disambut positif oleh berbagai kalangan hingga ke masyarakat. Bahkan setelah melihat kesuksesan MAN PK baik dalam aspek prestasi maupun *branding*-nya, maka penyelenggaraan MAN PK pun akhirnya ditambah lagi di lima tempat yang berbeda

yaitu di MAN Lampung, MAN Surakarta, MAN Banjarmasin, MAN Aceh dan MAN Mataran Nusa Tenggara Barat (Bustomi, 2023).

Keunggulan dari kurikulum yang dijalankan oleh MAN PK di seluruh Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dijadikan acuan sebagaimana misalnya pada MAN PK Ciawi Jawa Barat. Indikator paling menonjol untuk membuktikan kesuksesan MAN PK setidaknya dapat dilihat dalam beberapa aspek seperti pada; (1) input dan output, (2) proses belajar mengajar, (3) sarana dan prasarana, (4) prestasi belajar yang dicapai, dan (5) tenaga pengajar. Seperti yang pernah diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga bahwa layaknya MAN PK disebut sebagai madrasah unggulan adalah karena alumninya yang terbukti mampu tembus ke perguruan tinggi terbaik baik dalam negeri maupun luar negeri seperti Amerika, Eropa, Australia, Mesir dan negara Timur Tengah lainnya. Tidak selesai di sini, kiprah alumninya pun banyak yang terjun di dunia akademik baik sebagai dosen maupun pengasuh pesantren (Bustomi, 2023).

Dari tuntutan kurikulum MAPK, semua peserta didik juga dididik untuk membudayakan tradisi belajar yang bukan sekadar sistem full day (belajar seharian penuh), tetapi juga belajar pada malam harinya. Selain pembelajaran regular, MAPK juga memasukkan muatan keislaman dengan menjadikan waktu sore dan malam untuk kajian kitab kuning seperti materi ushul fiqh, fiqh, tafsir, hadist, nahwu Sharaf dan lain sebagainya. Pembelajarannya pun dikelola berdasarkan kelompok (*halaqoh*) dan waktu yang telah ditentukan sekitar setelah *isyah* hingga malam hari pukul 22.00. Di dalamnya peserta didik menimba ilmu dari para ustadz dan mengkaji materi dalam forum pembelajaran dan diskusi.

Dan juga dihadirkan program peningkatan skill berbahasa asing khususnya bahasa Arab dan Inggris untuk meluaskan kemampuan mengkaji beragam ilmu pengetahuan secara lebih luas. Bahkan skill Bahasa ini menjadi inti dari pada setiap program yang didesain dalam kurikulum MAPK ini. Apalagi keunggulannya ditambah dengan adanya para pengampu dan pendidik yang berkompeten. Karena jika dilihat dari aspek tenaga pengajar, mutu pendidik MAPK dinilai telah memenuhi standar mutu unggul. Pendidik ditekankan agar mampu menunjukkan kinerja profesionalismenya secara optimal untuk menjamin mutu sebagai pendidik. Keunggulan tersebut dapat dilihat dalam tiga hal; (1) semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum, (2) guru mata pelajaran kelompok umum seperti Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Sejarah diambil dari mereka yang mampu berbahasa Inggris, dan (3) guru-guru yang mengampu mata pelajaran agama seperti Tafsir, Hadis, Ushul Fiqih, dan Tarikh Tasyri' juga diambil dari yang mampu berbahasa Arab dengan baik (Bustomi, 2023).

Di samping itu, diamati dari aspek sarana dan prasarana berdasarkan acuan standar kunci minimal sebagaimana amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang memenuhi keperluan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kewajiban peserta didik, dinyatakan telah cukup melebihi standar indikator. Hal ini dapat dihasilkan dari beberapa hal; (1) ruangan kelas yang dilengkapi dengan standar pembelajaran berbasis TIK, (2) perpustakaan yang lengkap, (3) ruang multi media, (4) laboratorium bahasa dan komputer, (5) ruang unjuk seni budaya, (6) sarana olahraga,

dan (7) klinik. Maka MAN PK kala itu cukup menjadi perhatian karena kesuksesannya dalam melahirkan solusi atas kelangkaan ulama sebagaimana menjadi dasar dibentuknya.

KESIMPULAN

Mutu pendidikan suatu bangsa menjadi salah satu indikator kemajuan peradaban bangsa tersebut di mata dunia. Berbagai pihak berupaya untuk memajukan sistem pendidikannya agar siap berkompetisi dengan persaingan global mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas dan berkualitas baik dari aspek fisik, pengetahuan, teknologi, maupun karakter bangsa. Apalagi zaman terus menekan setiap individu agar mampu meng-*upgrade* diri di dunia industri dan pekerjaan.

Madrasah yang ada di Indonesia mendapat catatan untuk bisa dikembangkan. Munawir Syadzali menawarkan Program Khusus pada tataran madrasah di jenjang aliyah. Akhirnya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 371 tahun 1993, yang kurikulumnya tertuang pada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 374 tahun 1993 kemudian menjadi kunci untuk terbukanya secara resmi MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus) atas gagasan Munawir Syadzali ini. Dan ini menjadi satu pembaharuan pendidikan di Indonesia yang mencoba memodernisasi dunia pendidikan pada lembaga-lembaga yang ada saat itu.

Berjalannya lembaga ini cukup memberikan dampak besar karena terbukti mewujudkan solusi dari problema yang selama ini diresahkan. Lulusan MAN PK menurut pengamatan banyak ahli telah tercatat sebagai sarjana muslim yang unggul di perguruan tinggi baik di dalam maupun luar negeri. Mereka dibekali kemampuan Bahasa yang baik dan metode pembelajaran khusus yang intensif dan terkelola dengan baik selama masa belajar di program kaderisasi ulama ini. Kiprah alumennya pun sudah banyak terjun di berbagai instansi baik itu pendidikan dan akademis maupun bidang lainnya. Gagasan Munawir Syadzali ini menjadi contoh daripada suksesnya pengembangan dalam memodernisasi lembaga pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid. (1983). *Sistem Pendidikan Madrasah dan Pesantren di Sulawesi Selatan*. Rajawali.
- Bustomi, B. (2023). Rethinking: Madrasah Aliyah Program Khusus. *Madania: Jurnal Kajian Keislaman*, 15(1), 45–60.
- Chairiyah, Y. (2021). Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Islam. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(01), 49–60.
- Hasbullah. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. RajaGarafindo Persada.
- Ilyas, Y. (2006). Reaktualisasi ajaran Islam: studi atas pemikiran hukum Munawir Sjadzali. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 44(1), 223–240.
- Maksum. (1999). *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*. Logos.
- Peraturan Pemerintah RI. (2007). *Peraturan Pemerintah (PP) RI. Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*.
- Presiden Republik Indonesia. (2006). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*.
- Sholeh, S. (2016). *Konsep Pendidikan Islam Yang Ideal: Upaya Pembentukan*

Modernisasi Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia Menurut Munawir Syadzali

Rakhmad Zubair, Rustam Ibrahim

Keperibadian Muslim. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 13(1), 52-70.

Soenjono Dardjowidjojo. (2003). *Rampai Bahasa, Pendidikan, dan Budaya*. Yayasan Obor Indonesia.

Zakiah Daradjat. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam* (Cetakan ke). PT. Bumi Aksara.